

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Permasalahan akuntabilitas publik bisa muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya (Depitasari dkk, 2012). Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Mahaputra dan Putra, 2014).

Pengungkapan laporan keuangan adalah suatu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Juita, 2014). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif.

Suwarjono (2005:165) dalam penelitiannya menyatakan Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Agar informasi tersebut mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi penggunaannya maka informasi tersebut harus bisa memenuhi kualitas tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama satu periode guna mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan menentukan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan wajib di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun masih banyak temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik meningkat (Panamon, 2012).

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah maka diperlukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I tahun 2018 opini BPK untuk LKPD Kabupaten Pati tahun 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga kali berturut-turut. Menurut pernyataan Bupati Pati Haryanto (2018) mengatakan bahwa, peran akuntabilitas diwujudkan akan selalu dilakukan pengkajian dalam bentuk sharing peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), *workshop* akuntansi persediaan *Focus Grup Discussion* (FGD) pengelolaan BLUD, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dan *Government Finance Statistic* (GFS). Akan tetapi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pati menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang harus dievaluasi secara berkala berkaitan dengan mempertahankan kualitas laporan keuangan yang baik. Kelemahan-kelemahan

tersebut salah satunya mungkin dipengaruhi dari implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi dan peran internal audit.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Menurut Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa SIMDA merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Pada penelitian Abidin (2018), Simanjuntak (2019), dan Runtuwene (2017) menunjukkan bahwa implementasi SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Abidin (2018) dalam pengelolaan keuangan yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. Hal ini diperlukan untuk mengimplementasikan sistem-sistem yang berkaitan dengan akuntansi yang ada di pemerintahan. Menurut Suyono (2016) Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Menurut Suyono (2016) menyebutkan bahwa laporan keuangan

merupakan sebuah produk yang dihasilkan sebuah laporan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2018) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. sedangkan pada Suyono (2016) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi. Runtuwene (2017) menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan salah satu program reformasi birokrasi, dimana pemerintah yang selama ini kurang akuntabel dalam hal pengelolaan keuangan, dituntut menyampaikan laporan keuangan yang komprehensif dan handal kepada seluruh pengguna. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Suyono (2016) menyebutkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Pada penelitian Abidin (2018), Runtuwene (2017), Endiaanto (2017) dan Djalil (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Gamayuni (2018) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah peran internal audit. Peran internal audit dalam hal ini sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) sangat penting dalam membantu komitmen kepala daerah untuk mewujudkan optimalisasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Standar Audit AAIPI, 2014). Endianto (2017) menyatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah (auditor internal) pada kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/ pimpinan/ gubernur/ bupati/ walikota kepada pihak-pihak terkait. Tujuan review atas laporan keuangan pemerintah daerah ialah memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Pada penelitian Endianto (2017), Gamayuni (2018), Yadiati (2017), Umar (2018) dan Rahmatika (2014) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. sedangkan pada penelitian Suyono (2016) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2018) dengan judul Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan penambahan variabel yaitu

Peran Internal Audit atas dasar saran dari penelitian Abidin (2018) menyarankan untuk menambahkan variabel peran internal audit dan dasar dari penelitian lain yang menggunakan variabel tersebut yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Variabel tersebut digunakan dalam penelitian Endianto (2017) yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Gamayuni (2018), Yadiati (2017), Umar (2018) dan Rahmatika (2014) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. sedangkan pada penelitian Suyono (2016) menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada obyek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di kota Malang, sedangkan penelitian ini berfokus pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti secara empiris yang dapat dibuktikan. Maka dengan ini penulis akan melakukan penelitian tentang **“PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA), KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penulis membatasi penelitian ini agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini membahas tentang kualitas laporan keuangan yang dipengaruhi implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi dan peran internal audit.
2. Obyek penelitian ini difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Untuk menguji dan menganalisis kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji dan menganalisis peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait :

1. Pemerintahan

Terlihat bahwa sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah telah baik dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya kualitas informasi laporan keuangan yang di hasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengujian ulang mengenai sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam pembuatan pembutan laporan keuangan agar kualitas informasi laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan

2. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia,

penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas informasi laporan keuangan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti dimasa yang akan mendatang.

